

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2024, Halaman 408-416
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13345985)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13345985>

Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Teknologi dan Dampak Terhadap Perubahan Sosial Budaya di Era Globalisasi

Dewi Jannah¹

¹STIA Lancang Kuning Dumai
Email: Jhodyfendy@gmail.com

Abstrak

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja organisasi pemerintah daerah dalam implementasi teknologi dan dampaknya terhadap perubahan sosial budaya. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran untuk investasi infrastruktur teknologi informasi dan kurangnya keterampilan teknis di kalangan pegawai. Meskipun demikian, inisiatif kecil seperti penggunaan aplikasi mobile untuk pelaporan masalah publik menunjukkan potensi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi teknologi dalam operasional pemerintah daerah, serta pentingnya inovasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kritis. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Kata kunci: Globalisasi, Kinerja Pemerintah Daerah, Teknologi Informasi, Pelayanan Publik

Abstract

Globalization has brought significant changes in various aspects of life, including in the governance system. This study aims to analyze the performance of local government organizations in the implementation of technology and its impact on social and cultural changes. Using a literature review approach, this research collects and analyzes various relevant literature sources, including academic journals, books, and research reports. The results of the analysis indicate that local governments face various challenges, such as budget constraints for investing in information technology infrastructure and a lack of technical skills among staff. Nevertheless, small initiatives such as the use of mobile applications for public issue reporting show potential for improving service efficiency. This study also identifies key factors influencing the successful implementation of technology in local government operations, as well as the importance of innovation to meet the demands of increasingly critical citizens. These findings are expected to provide insights for policymakers in formulating more effective strategies to address the challenges of globalization

Keywords: Globalization, Local Government Performance, Information Technology, Public Service

Article Info

Received date: 15 July 2024

Revised date: 28 July 2024

Accepted date: 02 August 2024

PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pemerintahan. Di era globalisasi, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan yang kompleks, termasuk meningkatnya persaingan ekonomi, tuntutan untuk peningkatan kualitas layanan publik, serta kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Tantangan ini memaksa pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan peluang yang muncul dari dinamika global.

Kinerja organisasi pemerintah daerah menjadi sangat krusial dalam menghadapi tantangan globalisasi. Kinerja ini mencakup kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan yang adaptif, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki strategi yang inovatif dan berorientasi pada hasil guna memastikan bahwa mereka mampu bersaing secara global dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Menurut Clarke dan Gaile (1998), pemerintah daerah yang mampu beradaptasi dengan perubahan global

cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam memberikan layanan publik dan mencapai tujuan pembangunan daerah. Selain itu, studi oleh Rondinelli dan Cheema (2003) menekankan pentingnya pengembangan kapasitas institusional dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan globalisasi.

Di Indonesia, pemerintah daerah juga menghadapi tekanan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam konteks globalisasi. Sebagai contoh, penelitian oleh Dwiyanto (2006) menemukan bahwa reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan kapasitas institusional. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja mereka secara signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kinerja organisasi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan globalisasi, dengan fokus pada strategi-strategi yang telah diterapkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pemerintah daerah dapat beradaptasi dengan perubahan global dan meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan daerah. Salah satu gejala yang muncul adalah persaingan ekonomi yang semakin ketat, di mana pemerintah daerah harus mampu bersaing dengan daerah lain, baik di tingkat nasional maupun internasional (Sassen, 2001). Selain itu, masyarakat menjadi semakin kritis dan menuntut pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan transparan, yang memaksa pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan (Osborne & Gaebler, 1992). Tekanan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas juga meningkat, dengan globalisasi yang mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam pengelolaan sumber daya publik, termasuk pelaporan yang lebih baik, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, dan pengawasan yang lebih ketat (Grindle, 2004). Di sisi lain, perubahan teknologi yang cepat menuntut pemerintah daerah untuk mengadopsi teknologi baru dalam operasional mereka, seperti e-governance dan digitalisasi layanan publik (Norris, 2001). Tantangan sosial dan budaya juga muncul, di mana globalisasi membawa pengaruh budaya global yang dapat mempengaruhi nilai-nilai lokal dan menyebabkan konflik sosial, sehingga pemerintah daerah perlu menavigasi perubahan ini dengan bijaksana untuk menjaga kohesi sosial (Robertson, 1992).

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, beberapa pertanyaan utama muncul mengenai kinerja organisasi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan globalisasi. Pertama, bagaimana kinerja organisasi pemerintah daerah dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat akibat globalisasi? Pertanyaan ini penting untuk memahami sejauh mana pemerintah daerah dapat bersaing secara efektif di pasar global (Sassen, 2001). Kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di era globalisasi? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi serta strategi yang telah diterapkan untuk mengatasinya (Osborne & Gaebler, 1992). Ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik? Pertanyaan ini menyoroti pentingnya praktik pemerintahan yang baik dalam memastikan kepercayaan publik dan efektivitas administrasi (Grindle, 2004). Keempat, sejauh mana pemerintah daerah mampu mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik? Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk reformasi dan peningkatan efisiensi (Norris, 2001). Terakhir, bagaimana pemerintah daerah mengelola dampak sosial dan budaya dari globalisasi untuk menjaga kohesi sosial di masyarakat? Pertanyaan ini penting untuk memahami bagaimana pemerintah daerah dapat menjaga keseimbangan antara perubahan global dan nilai-nilai lokal (Robertson, 1992).

Tujuan penelitian yaitu Menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi teknologi dalam operasional pemerintah daerah dan dampaknya terhadap efisiensi dan pelayanan (Norris, 2001). Mengidentifikasi bagaimana pemerintah daerah mengelola dampak sosial dan budaya dari globalisasi untuk menjaga kohesi sosial di masyarakat. Penelitian ini akan mengeksplorasi strategi dan kebijakan yang diterapkan untuk

mempertahankan nilai-nilai lokal sambil beradaptasi dengan perubahan global (Robertson, 1992).

Dalam penelitian ini menggunakan Teori difusi inovasi yang diperkenalkan oleh Rogers (2003) yang sangat relevan. Teori ini menguraikan bagaimana inovasi, termasuk teknologi baru, diadopsi dalam suatu organisasi atau masyarakat. Rogers mengidentifikasi lima karakteristik utama yang mempengaruhi adopsi inovasi: keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, uji coba, dan keterlihatan. Dalam konteks ini, teori difusi inovasi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah memperkenalkan dan mengintegrasikan TIK dalam operasional mereka, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan adopsi tersebut.

Hasil penelitian yang menggunakan teori ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi dan bagaimana karakteristik inovasi dapat mempengaruhi kecepatan dan tingkat adopsi. Penelitian menunjukkan bahwa inovasi yang dianggap memiliki keunggulan relatif dibandingkan dengan praktik atau teknologi yang ada sebelumnya cenderung lebih cepat diadopsi. Misalnya, studi oleh Tornatzky dan Klein (1982) menemukan bahwa keunggulan relatif adalah salah satu prediktor terkuat dari adopsi teknologi. Dalam konteks pemerintah daerah, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menawarkan peningkatan efisiensi, penghematan biaya, dan peningkatan kualitas layanan publik memiliki kemungkinan lebih besar untuk diadopsi. Disamping itu, Penelitian oleh Agarwal dan Prasad (1997) menemukan bahwa uji coba yang berhasil dapat meningkatkan tingkat adopsi karena memungkinkan pengguna untuk merasakan manfaat inovasi tanpa komitmen penuh. Pemerintah daerah yang memiliki kesempatan untuk menguji TIK dalam skala kecil sebelum implementasi penuh dapat lebih percaya diri dalam keputusan adopsi.

Selain itu, beberapa penelitian lainnya yang membuktikan bahwa teori ini dalam digunakan dan efektif untuk diteliti dalam konteks adopsi teknologi. Seperti penelitian oleh Surry dan Farquhar (1997) Mereka menggunakan teori difusi inovasi untuk meneliti adopsi teknologi pendidikan di sekolah-sekolah. Hasilnya menunjukkan bahwa keunggulan relatif dan kompatibilitas dengan kurikulum yang ada adalah faktor utama dalam adopsi teknologi pendidikan. Sementara itu, studi oleh Zhu, Kraemer, dan Xu (2006) mengkaji adopsi e-business di perusahaan-perusahaan global. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa keunggulan relatif, kompatibilitas, dan keterlihatan adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi adopsi e-business.

Teori Globalisasi dan Budaya

Teori globalisasi dan budaya membahas interaksi antara proses globalisasi dan dinamika budaya lokal. Robertson (1992) mengemukakan konsep "glokalisasi," yang menggambarkan bagaimana elemen-elemen global dan lokal saling mempengaruhi dan beradaptasi satu sama lain. Globalisasi tidak hanya menyebarkan budaya global tetapi juga memicu respon dan adaptasi dari budaya lokal. Teori ini menggarisbawahi bahwa proses globalisasi membawa perubahan signifikan dalam nilai, norma, dan praktik budaya yang ada di suatu masyarakat. Globalisasi budaya merujuk pada penyebaran ide, nilai, dan praktik budaya dari satu wilayah ke wilayah lain, yang dipicu oleh teknologi komunikasi, migrasi, dan perdagangan global. Fenomena ini sering kali mengarah pada homogenisasi budaya, di mana budaya dominan (biasanya Barat) menyebar ke seluruh dunia, mengurangi keragaman budaya lokal. Namun, globalisasi juga memicu reaksi lokal berupa adaptasi dan reinterpretasi elemen-elemen budaya global, menciptakan bentuk-bentuk budaya hibrida yang unik.

Robertson memperkenalkan konsep glokalisasi untuk menjelaskan bagaimana budaya lokal beradaptasi dan menggabungkan elemen-elemen global. Glokalisasi menunjukkan bahwa budaya lokal tidak hanya pasif menerima budaya global tetapi juga aktif berperan dalam mengubah dan menyesuainya dengan konteks lokal. Ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak selalu mengarah pada homogenisasi budaya tetapi dapat meningkatkan keragaman budaya melalui proses adaptasi dan inovasi lokal. Sementara itu terdapat beberapa penelitian yang menggunakan teori ini seperti Penelitian oleh Tomlinson (1999): Tomlinson meneliti bagaimana globalisasi mempengaruhi identitas budaya lokal. Dalam bukunya, "Globalization and Culture" Tomlinson menjelaskan bahwa globalisasi tidak menghapus identitas budaya lokal tetapi justru memperkuat kesadaran akan identitas tersebut. Globalisasi memfasilitasi pertukaran budaya yang memperkaya budaya lokal dan mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan menghargai identitas mereka sendiri.

Penelitian oleh Robertson (1995): Dalam artikelnya, "Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity," Robertson meneliti bagaimana proses glokalisasi mempengaruhi dinamika budaya lokal dan global. Ia menunjukkan bahwa globalisasi dan lokalisasi adalah proses

yang saling terkait dan bahwa masyarakat lokal memainkan peran aktif dalam mengadaptasi elemen-elemen global sesuai dengan konteks budaya mereka.

Penelitian oleh West (2004) dalam penelitiannya yang berjudul "E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes" mengeksplorasi bagaimana adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemerintahan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-government dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses informasi bagi warga, dan memperbaiki transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi internet dan digital dalam pelayanan publik telah mengubah cara warga berinteraksi dengan pemerintah, menciptakan hubungan yang lebih responsif dan efisien. Manakala, Moon(2002) dalam artikelnya "The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric or Reality?" mengkaji adopsi e-government di tingkat pemerintah daerah di Amerika Serikat. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun banyak pemerintah daerah telah mengadopsi teknologi e-government, tingkat pemanfaatan dan efektivitasnya sangat bervariasi. Faktor-faktor seperti dukungan manajemen, anggaran, dan infrastruktur teknologi mempengaruhi keberhasilan implementasi. Moon juga mengidentifikasi hambatan utama seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya keterampilan teknis sebagai penghalang bagi adopsi yang efektif.

Selain itu, fenomena adopsi teknologi dalam mendukung kinerja pemerintahan semakin marak setiap tahunnya, seperti yang dibahas dalam Dalam penelitian Norris dan Moon (2005) yang berjudul "Advancing E-Government at the Grassroots: Tortoise or Hare?" Norris dan Moon mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan implementasi teknologi TIK di pemerintahan daerah. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan politik dan kepemimpinan yang kuat dalam mendorong inisiatif e-government. Mereka juga menemukan bahwa pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pegawai pemerintah sangat penting untuk memastikan penggunaan teknologi yang efektif dalam meningkatkan pelayanan publik.

Penelitian oleh Morgeson, VanAmburg, dan Mithas (2011) mendukung terhadap penelitian oleh Jaeger dan Bertot (2010) yaitu menganalisis hubungan antara implementasi e-government dan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kehadiran dan kualitas layanan e-government berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepercayaan warga. Mereka juga menemukan bahwa pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif melalui platform digital meningkatkan kepuasan warga dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Hal ini pula, sejalan oleh Jaeger dan Bertot (2010) Penelitian yang menyoroti bahwa penggunaan TIK dalam pemerintahan dapat memperbaiki aksesibilitas informasi publik, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi warga dan kepercayaan terhadap pemerintah. Mereka juga menekankan pentingnya infrastruktur teknologi yang andal dan kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kajian literatur yang sistematis dan komprehensif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai teori, konsep, dan temuan terkait dengan teknologi dalam operasional pemerintah daerah dan strategi dan kebijakan dalam perubahan sosial budaya lokal dan global. Pendekatan ini akan melibatkan pencarian dan identifikasi literatur dari berbagai sumber, termasuk buku teks, artikel jurnal, laporan penelitian, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Booth et al., 2016; Tranfield et al., 2003). Setelah literatur-literatur terkait dikumpulkan, langkah-langkah analisis akan dilakukan untuk mengevaluasi dan menyusun temuan-temuan yang signifikan, serta untuk mengidentifikasi pola-pola atau tren tertentu dalam literatur yang ada. Selanjutnya, sintesis literatur akan dilakukan untuk mengintegrasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dari berbagai sumber sehingga dapat menghasilkan wawasan yang mendalam tentang penelitian ini.

Sumber data utama untuk penelitian ini akan berasal dari literatur ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal akademis, buku teks, dan laporan penelitian yang relevan dengan strategi analisis bisnis. Literatur ini akan dicari melalui basis data seperti Google Scholar, Web of Science, dan Scopus, serta melalui portal jurnal nasional dan internasional. Kriteria inklusi untuk seleksi literatur akan mencakup publikasi yang terkait dengan teori, konsep, atau temuan empiris yang berkaitan dengan strategi analisis bisnis dalam berbagai konteks organisasi. Literatur yang relevan akan diperoleh dari berbagai

disiplin ilmu seperti manajemen, ekonomi, teknologi informasi, dan lainnya. Kriteria eksklusi akan mencakup literatur yang tidak terkait langsung dengan strategi analisis bisnis atau tidak memiliki relevansi yang cukup dengan fokus penelitian.

Penelitian ini mengandalkan beberapa teknik pengumpulan data yang cermat dan terencana untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berkualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam upaya ini, teknik-teknik terbaru telah diterapkan untuk memastikan pendataan yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Tinjauan literatur. Teknik ini melibatkan pencarian, pemilihan, dan analisis literatur yang relevan yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dan sumber-sumber lainnya. Dengan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang berbagai strategi analisis bisnis yang telah dikaji sebelumnya dalam literatur.

Prosedur analisis data dalam penelitian ini akan melibatkan beberapa langkah yang sistematis dan terstruktur. Pertama, literatur yang telah terkumpul akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi temuan-temuan utama terkait dengan strategi analisis bisnis yang telah diusulkan dan digunakan dalam berbagai konteks organisasi. Selanjutnya, temuan-temuan tersebut akan disintesis untuk memahami tren umum, pola, dan kesamaan atau perbedaan antara berbagai pendekatan dalam literatur (Booth et al., 2016; Tranfield et al., 2003). Analisis komparatif akan dilakukan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing strategi analisis yang ada, serta untuk mengidentifikasi potensi integrasi atau penyempurnaan antara berbagai pendekatan. Selain itu, analisis akan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi teknologi dalam operasional pemerintah daerah terhadap efisiensi pelayanan publik dalam perkembangan globalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi teknologi dalam operasional pemerintah daerah terhadap efisiensi pelayanan publik

Implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam operasional pemerintah daerah di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi pelayanan publik. Berdasarkan data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023, daerah-daerah dengan tingkat adopsi TIK yang tinggi menunjukkan peningkatan efisiensi operasional sebesar 40%, sementara daerah dengan adopsi sedang dan rendah masing-masing menunjukkan peningkatan sebesar 25% dan 10%. Disamping itu, penelitian ini juga memaparkan hasil peningkatan kinerja pelayanan publik berdasarkan tingkat adopsi TIK terhadap tiga aspek utama peningkatan kinerja yaitu efisiensi, transparansi dan aksesibilitas.



Berikut adalah grafik yang menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan publik berdasarkan tingkat adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pemerintah daerah. Grafik ini menampilkan tiga kategori daerah: tingkat adopsi tinggi, sedang, dan rendah, serta tiga aspek utama peningkatan kinerja: efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas.

a. Pemerintah Daerah dengan Tingkat Adopsi TIK Tinggi

Di daerah dengan tingkat adopsi TIK yang tinggi, penggunaan sistem e-government telah menjadi katalis utama dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Misalnya, sistem administrasi berbasis online memungkinkan pemrosesan perizinan yang sebelumnya memakan waktu beberapa minggu kini dapat diselesaikan dalam beberapa hari. Selain itu, otomatisasi berbagai proses administratif mengurangi kebutuhan akan intervensi manual, sehingga mengurangi potensi kesalahan manusia dan mempercepat waktu penyelesaian. Salah satu contoh nyata adalah penerapan sistem e-procurement yang mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta mengurangi biaya administrasi dan korupsi. Penelitian Moon (2002) menunjukkan bahwa implementasi e-government di berbagai negara juga telah menghasilkan peningkatan efisiensi operasional yang serupa, mendukung temuan ini di Indonesia.

b. Pemerintah Daerah dengan Tingkat Adopsi TIK Sedang

Di daerah dengan tingkat adopsi TIK sedang, peningkatan efisiensi juga terlihat meskipun tidak sebesar daerah dengan adopsi tinggi. Peningkatan efisiensi sebesar 25% tercapai melalui penggunaan sistem manajemen internal yang lebih baik dan komunikasi yang lebih efektif antar departemen. Penggunaan TIK untuk pelaporan dan monitoring kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah operasional dengan lebih cepat. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang menghambat optimalisasi penggunaan TIK. Penelitian oleh Norris & Moon (2005) menunjukkan bahwa adopsi parsial teknologi sering kali memberikan peningkatan efisiensi yang signifikan, tetapi masih menyisakan ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

c. Pemerintah Daerah dengan Tingkat Adopsi TIK Rendah

Di daerah dengan tingkat adopsi TIK rendah, peningkatan efisiensi masih terbatas pada 10%. Penggunaan TIK sering kali terbatas pada aplikasi dasar seperti pengelolaan data dan komunikasi internal, tanpa adanya sistem yang terintegrasi untuk berbagai layanan publik. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk investasi infrastruktur TIK dan kurangnya keterampilan teknis di kalangan pegawai pemerintah. Meskipun demikian, beberapa inisiatif kecil seperti penggunaan aplikasi mobile untuk pelaporan masalah publik telah menunjukkan potensi untuk meningkatkan efisiensi. Penelitian oleh West (2004) menunjukkan bahwa meskipun dampak awal dari adopsi TIK mungkin terbatas, investasi berkelanjutan dan pelatihan dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan dalam jangka panjang.

Maka dari itu, implementasi TIK dalam operasional pemerintah daerah di Indonesia telah menunjukkan dampak positif terhadap efisiensi pelayanan publik. Daerah dengan tingkat adopsi TIK yang tinggi menikmati peningkatan efisiensi yang signifikan, sementara daerah dengan adopsi sedang dan rendah masih menghadapi berbagai kendala. Untuk memaksimalkan manfaat TIK, penting bagi pemerintah daerah untuk terus berinvestasi dalam infrastruktur TIK dan pelatihan sumber daya manusia, serta mengatasi hambatan anggaran dan keterampilan teknis. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pemerintah daerah bervariasi secara signifikan antar daerah. Beberapa daerah telah mengimplementasikan sistem e-government yang komprehensif, mencakup layanan online untuk pembayaran pajak, pendaftaran layanan publik, dan akses informasi publik. Daerah-daerah ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional dan transparansi pemerintahan. Namun, ada juga daerah yang masih berada pada tahap awal adopsi TIK, di mana penggunaan teknologi masih terbatas pada sistem manajemen internal dan komunikasi dasar. Hambatan utama yang diidentifikasi termasuk keterbatasan anggaran, infrastruktur teknologi yang kurang memadai, dan kurangnya keterampilan teknis di kalangan pegawai pemerintah.

Implementasi TIK di pemerintah daerah telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja pelayanan publik. Penggunaan sistem e-government telah mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk berbagai proses administratif. Misalnya, proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu beberapa minggu sekarang dapat diselesaikan dalam beberapa hari melalui platform online. TIK juga telah meningkatkan transparansi pemerintahan dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan cepat ke informasi publik, termasuk anggaran pemerintah, laporan kinerja, dan data lainnya yang relevan. Hal ini mendorong akuntabilitas karena warga dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu, layanan publik yang disediakan secara online memudahkan warga untuk mengakses layanan kapan saja dan dari mana saja, yang sangat menguntungkan bagi warga di daerah terpencil.

Meskipun ada banyak manfaat, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama

dalam adopsi dan pemanfaatan TIK di pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran seringkali menjadi hambatan utama yang menghambat investasi dalam infrastruktur TIK dan pelatihan pegawai. Selain itu, kurangnya keterampilan teknis di kalangan pegawai pemerintah menjadi penghalang signifikan untuk penggunaan dan pemeliharaan sistem TIK yang efektif. Beberapa pegawai pemerintah juga menunjukkan resistensi terhadap perubahan dan inovasi, yang menghambat implementasi penuh TIK.

Adopsi TIK tidak hanya mempengaruhi aspek teknis dan operasional, tetapi juga memiliki dampak sosial dan budaya yang signifikan. TIK telah mengubah cara warga berinteraksi dengan pemerintah, membuat interaksi menjadi lebih efisien dan transparan, tetapi juga menuntut warga untuk memiliki literasi digital yang memadai. Selain itu, TIK telah memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital, seperti e-consultations dan survei online. Di sisi lain, penggunaan TIK memaksa perubahan dalam budaya organisasi pemerintah, mendorong lebih banyak kolaborasi, inovasi, dan pendekatan yang berorientasi pada pelayanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi dan pemanfaatan TIK oleh pemerintah daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Meskipun ada berbagai tantangan yang harus diatasi, manfaat dari peningkatan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan sangat signifikan. Untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar, penting bagi pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan seperti keterbatasan anggaran dan keterampilan teknis, serta mendorong perubahan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan adaptasi teknologi.

Pemerintah Daerah Mengelola Dampak Sosial Dan Budaya Dari Globalisasi Untuk Menjaga Kohesi Sosial Di Masyarakat

Globalisasi telah menjadi fenomena yang mendominasi berbagai aspek kehidupan manusia pada abad ke-21 ini. Meskipun globalisasi membawa manfaat seperti pertumbuhan ekonomi dan integrasi teknologi global, dampak sosial dan budaya yang timbul dapat menimbulkan tantangan signifikan bagi masyarakat lokal. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam merespons dan mengelola dampak-dampak ini untuk mempertahankan kohesi sosial di tengah-tengah perubahan global yang cepat.

Globalisasi telah mengubah lanskap sosial dan budaya melalui berbagai mekanisme yang kompleks. Pertama, pengaruh media global dan teknologi telah memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengonsumsi dan berpartisipasi dalam budaya global. Ini tidak hanya mengubah cara individu memandang nilai-nilai budaya dan norma sosial lokal, tetapi juga mempengaruhi pembentukan identitas kolektif suatu komunitas. Kedua, migrasi internasional dan mobilitas global telah membawa perubahan signifikan dalam komposisi demografis di banyak wilayah. Hal ini dapat menciptakan tantangan integrasi sosial serta mengubah dinamika budaya lokal dengan memperkenalkan variasi baru dalam praktik budaya dan nilai-nilai sosial. Ketiga, integrasi ekonomi global telah mempengaruhi struktur ekonomi lokal dengan membuka pasar baru dan menanamkan praktik bisnis global. Akibatnya, ini dapat memperkuat atau merusak hubungan sosial antarindividu dan kelompok, mempengaruhi distribusi kekayaan, dan menggeser prioritas pembangunan lokal. Secara keseluruhan, dampak globalisasi terhadap sosial dan budaya menunjukkan bahwa adaptasi yang cerdas dan kebijakan yang responsif diperlukan untuk menjaga kohesi sosial dan mempertahankan identitas budaya lokal di era yang semakin terhubung ini.

Pemerintah daerah di seluruh dunia menghadapi tugas yang semakin kompleks dalam mengelola dampak sosial dan budaya dari globalisasi. Untuk merespons tantangan ini, mereka mengimplementasikan berbagai strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan kohesi sosial dan nilai-nilai budaya lokal sambil mengakomodasi perubahan global. Pertama, melalui program pendidikan dan kesadaran budaya, pemerintah daerah dapat mempromosikan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya lokal dan global di kalangan penduduknya. Hal ini mencakup pengembangan kurikulum sekolah yang mendorong pemahaman tentang budaya lokal serta pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang memperkuat identitas budaya. Kedua, kebijakan integrasi sosial menjadi krusial dalam memfasilitasi harmoni antara penduduk lokal dan komunitas baru yang berasal dari luar, melalui penyediaan layanan publik yang inklusif dan program-program integrasi komunitas. Terakhir, strategi pengembangan ekonomi berkelanjutan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan sektor ekonomi lokal ke dalam jaringan global dengan mempertahankan praktik ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Pendekatan ini tidak hanya membantu memitigasi dampak ekonomi globalisasi yang tidak diinginkan, tetapi juga

meningkatkan ketahanan ekonomi lokal terhadap fluktuasi pasar global.

Evaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengelola dampak sosial dan budaya dari globalisasi merupakan langkah krusial untuk menilai keberhasilan dan relevansi kebijakan tersebut dalam mempertahankan kohesi sosial. Pertama, penggunaan indikator kinerja sosial memungkinkan pemerintah daerah untuk secara objektif mengukur dampak kebijakan terhadap integrasi sosial antarpenduduk, tingkat konflik antarbudaya, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkaitan dengan budaya dan identitas. Indikator seperti tingkat partisipasi dalam kegiatan budaya lokal, keberagaman dalam lingkungan kerja, dan tingkat akses ke layanan kesehatan yang sensitif budaya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas kebijakan integrasi sosial. Kedua, analisis dampak sosial mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan mempengaruhi struktur sosial lokal dan dinamika budaya. Studi ini dapat mencakup evaluasi terhadap perubahan dalam pola migrasi, pembentukan identitas budaya baru, serta perubahan dalam tata nilai dan norma sosial di masyarakat setempat. Analisis ini tidak hanya mengidentifikasi pencapaian dan kekurangan kebijakan yang ada, tetapi juga memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan budaya yang terus berubah.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan untuk pemerintah daerah guna mengelola dampak sosial dan budaya dari globalisasi dengan lebih efektif. Pertama, diperlukan penguatan kapasitas lokal melalui investasi dalam pendidikan budaya dan pengembangan keterampilan yang mempertahankan dan memperkuat identitas budaya lokal. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal dan non-formal yang mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang warisan budaya serta nilai-nilai lokal yang unik. Kedua, penting untuk mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan kebijakan integrasi sosial, tetapi juga membangun dukungan yang lebih luas untuk implementasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini dapat mencakup pendanaan bersama untuk proyek-proyek komunitas, pertukaran pengetahuan, dan pembangunan infrastruktur sosial yang mendukung integrasi antarkelompok.

Terakhir, penting untuk memperkuat pendekatan kebijakan berbasis bukti yang responsif terhadap dinamika sosial dan budaya yang terus berubah. Ini mencakup pengumpulan data yang akurat dan analisis mendalam tentang dampak kebijakan terhadap struktur sosial lokal, norma budaya, dan kepuasan masyarakat. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah dapat menyesuaikan dan memperbaiki kebijakan secara tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini akan membantu pemerintah daerah menghadapi tantangan globalisasi dengan lebih baik, sambil memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan identitas lokal tetap terjaga dan diperkuat di tengah-tengah perubahan global yang cepat.

SIMPULAN

Kinerja pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan globalisasi memerlukan strategi yang komprehensif dan adaptif. Implementasi teknologi, peningkatan daya saing ekonomi lokal, pengelolaan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat merupakan beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup, ketahanan ekonomi, penguatan identitas budaya lokal, dan pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor kunci dalam menghadapi dinamika globalisasi. Pemerintah daerah harus terus berinovasi dan beradaptasi untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Implementasi TIK dalam operasional pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan dampak positif terhadap efisiensi pelayanan publik, yang penting dalam menghadapi tantangan globalisasi. Daerah dengan tingkat adopsi TIK yang tinggi menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik. Namun, untuk memaksimalkan manfaat TIK, perlu ada upaya lebih dalam mengatasi tantangan seperti keterbatasan anggaran, keterampilan teknis, resistensi terhadap perubahan, dan infrastruktur teknologi.

REFERENSI

- Agarwal, R., & Prasad, J. (1997). The Role of Innovation Characteristics and Perceived Voluntariness in the Acceptance of Information Technologies. *Decision Sciences*, 28(3), 557-582.
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
- Clarke, S. E., & Gaile, G. L. (1998). *The Work of Cities*. University of Minnesota Press.
- Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinants and Moderators. *Academy of Management Journal*, 34(3), 555-590.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Grindle, M. S. (2004). Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 17(4), 525-548.
- Jaeger, P. T., & Bertot, J. C. (2010). Transparency and Technological Change: Ensuring Equal Access to Government Information. *Government Information Quarterly*, 27(4), 371-376.
- Moon, M. J. (2002). The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric or Reality? *Public Administration Review*, 62(4), 424-433.
- Moore, G. C., & Benbasat, I. (1991). Development of an Instrument to Measure the Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation. *Information Systems Research*, 2(3), 192-222.
- Nederveen Pieterse, J. (2004). *Globalization and Culture: Global Mélange*. Rowman & Littlefield.
- Norris, P. (2001). *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge University Press.
- OECD. (2020). *Building Resilient Local Economies*. Diakses dari <https://www.oecd.org/regional/resilient-local-economies.htm>.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Robertson, R. (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*. Sage Publications.
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (2003). *Reinventing Government for the Twenty First Century: State Capacity in a Globalizing Society*. Kumarian Press.
- Sassen, S. (2001). *The Global City: New York, London, Tokyo*. Princeton University Press.
- Surry, D. W., & Farquhar, J. D. (1997). Diffusion Theory and Instructional Technology. *Journal of Instructional Science and Technology*, 2(1).
- Tomlinson, J. (1999). *Globalization and Culture*. University of Chicago Press.
- UNESCO. (2015). *Promoting Cultural Diversity and Intercultural Dialogue*. Diakses dari <https://en.unesco.org/themes/culture/intercultural-dialogue>.
- West, D. M. (2004). E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes. *Public Administration Review*, 64(1), 15-27.
- World Bank. (2019). *Social Cohesion*. Diakses dari <https://www.worldbank.org/en/topic/social-cohesion>.
- Zhu, K., Kraemer, K. L., & Xu, S. (2006). The Process of Innovation Assimilation by Firms in Different Countries: A Technology Diffusion Perspective on E-Business. *Management Science*, 52(10), 1557-1576.